

WACANA MODERNISASI DALAM TANTANGAN PERADABAN, PERAN PEREMPUAN SEBAGAI TONGGAK SEJARAH ARAB SAUDI

Anis Rosida

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: nisya_rose@ymail.com

Abstract

New hope is being harvested in the Middle East especially the region of Saudi Arabia, the axis of religious civilization, the history and the crossroad of East and West. A taboo region of the term 'Modern' or even reject the extremes of change. At the moment, since the vision of 2030 is proclaimed as the goal of the absolute state it becomes softened. The Saudi Arabian government is trying to divert its attention so far from oil to a more profitable sector. This process will take a lot of effort in terms of political, religious, cultural, social and economic of course. In this study we can ask 'how the concept of modernization would be brought by Saudi Arabia and its scope, how are these challenges of change occurring and especially in the context of women as milestone to change?', this research take a field study with data sources of factual issues of social media such as newspapers and research results that using data analysis methods about theory of feminism and these results proved that this modernization effort is continuing in this region to attract the negative issues that have so far been the label of the ultra-conservative region and certainly to maintain that power. The most effective thing is to use the issue of women and gender as a milestone until modernization's discourse could be realized.

Key: *Modernization, Civilization Challenges, Involving Women and Gender Issues, Feminism.*

Abstrak

Harapan baru sedang dituai di Timur Tengah terutama kawasan Arab Saudi, poros peradaban agama, sejarah serta pertemuan dua arah Timur dan Barat. Sebuah kawasan yang tabu akan istilah 'Modern' atau dalam kutip 'menolak ekstrem' adanya perubahan. Namun pada saat ini, sejak visi 2030 dicanangkan sebagai tujuan dari negara absolut tersebut semakin melunak. Pemerintah Arab Saudi berusaha untuk mengalihkan perhatiannya selama ini dari minyak ke sektor yang lebih menguntungkan. Sebuah proses yang akan memakan banyak upaya dari segi apapun baik politik, agama, budaya, sosial dan ekonomi tentunya. Dalam penelitian ini kita dapat menanyakan bagaimana konsep modernisasi yang dibawakan Arab Saudi dan ruang lingkungannya, bagaimana tantangan perubahan terjadi khususnya pada konteks perempuan sebagai salah satu tonggak sejarah menuju perubahan? Kajian ini mengambil studi lapangan dengan sumber data isu-isu faktual media sosial semisal Koran dan beberapa hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis data tentang teori feminisme. Hasil ini membuktikan bahwa upaya modernisasi sedang berlanjut di kawasan tersebut untuk menarik isu-isu negatif yang selama ini menjadi label kawasan ultrakonservatif itu dan pastinya untuk mempertahankan kekuasaan tersebut, hal yang paling efektif adalah menggunakan isu perempuan dan gender sebagai tonggak sejarah sehingga wacana modernisasi tersebut dapat terealisasi.

Kata Kunci: *Modernisasi, Tantangan Peradaban, Peran Perempuan dan Isu Gender, Feminisme*

PENDAHULUAN

Pada nyatanya, hampir semua hak perempuan Saudi terampas akibat adanya aturan pemaksaan kaum agamawan dan pemerintah Arab Saudi. Perempuan Saudi lebih memilih diam dan menerima realitas yang diterimanya dan hal ini seringkali dianggap sebagai suatu alasan jawaban bagi mereka bahwa apa yang mereka jalani adalah suatu pembenaran atas apa yang mereka yakini.

Kewajiban seorang perempuan menurut Islam tentunya tidak lepas dari doktrin yang menjelaskan 'perempuan selalu dianggap nomor ke sekian setelah suami mereka. Mereka harus *sami'na wa atho'na* menjalankan rutinitas kehidupan sehari-hari di bawah naungan suami sebagai kepala rumah tangga'. Misalnya mengenai soal keuangan, kebanyakan perempuan Arab akan mengatakan, sesungguhnya masalah tersebut seharusnya ditangani oleh suaminya, mereka hanya perlu menggunakan uang tersebut untuk keperluan rumah tangga dan anak-anaknya. Mereka mempercayakan hal tersebut kepada kaum laki-laki dan mengatakan dengan penuh percaya diri hal tersebut sudah menjadi aturan dalam Al-Quran, bahwa perempuan telah dilindungi oleh Islam dan mereka tidak meragukan hal tersebut. Dan menjadi sebuah justifikasi sosial jika kesuksesan seorang perempuan Arab terletak pada bagaimana dia dapat mengurus rumah, anak dan pekerjaannya. Faktor kultural dan pemahaman agama inilah yang menjadi salah satu rintangan usaha pemerintah memodernisasikan kawasan tersebut.

Namun, bagaimana dengan persoalan perempuan di ranah publik? Ini masih banyak distorsi berbeda dari berbagai kalangan terutama kalangan ulama Arab Saudi yang mempunyai pengaruh kuat atas legitimasi negara setelah pemerintah. Sejak visi 2030 yang dikembangkan pemerintah Arab Saudi guna memodernisasikan kawasan tersebut, beberapa kebijakan dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian Arab Saudi yang bergantung pada minyak. Perencanaan ini merupakan proses diversifikasi perekonomian negara yang tidak hanya mencakup pengurusan materi finansial saja tetapi juga menyangkut tentang kredibilitas Arab Saudi sebagai salah satu pusat peradaban Islam.

Agenda visi 2030 merupakan 'aset besar' menuju modernitas negara. Salah satunya adalah mengantar peran perempuan mengembangkan bakatnya dan bagaimana perempuan dapat menginvestasikan kemampuan yang dimiliki¹. Bagaimanapun topik pembicaraan perempuan kerap kali menjadi bahan utama dalam diskusi hangat di beberapa universitas dan beberapa usaha perempuan pun menunjukkan talenta mereka di ruang sudut

¹ Vision 2030, hal. 37.

yang berbeda. Sayangnya, performa mereka menunjukkan presentase yang minim dalam urusan ketenagakerjaan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan ranah publik. Dilansir dari *'The Global Gender Gap Index 2010'* dalam *World Economic Forum*², Saudi menduduki peringkat 129 dari 134 negara yang menjunjung loyalitas persamaan hak perempuan dan jikapun visi 2030 terealisasi, diharapkan momen ini menjadi kesempatan pemerintah menuju perubahan terutama dalam persoalan hak asasi perempuan dan isu gender.

Akhir-akhir ini upaya pemerintah Arab Saudi dalam menangani konteks perempuan sedikit melonggar, pemerintah semakin menunjukkan simpati mereka kepada perempuan yang selama ini merasa terkekang adanya pembatasan terutama dalam ranah publik yang kebanyakan menjadi tempat bagi mayoritas laki-laki. Misalnya tentang keputusan pembolehan perempuan Arab Saudi bekerja di berbagai tempat penjualan yang masih bersifat privat dan kemungkinan akan terjadi lonjakan besar angka partisipasi mereka apabila telah memasuki dunia lapangan kerja. Langkah ini menjadi daya suatu yang menarik dan memiliki makna simbolik serta dampak praktis pada kemampuan perempuan melangkahhkan kakinya ke berbagai bidang ekonomi dan kehidupan sosial Arab Saudi.

Pembukaan kampus untuk semua kalangan tanpa membedakan jenis kelamin untuk pertamakalinya dirintis oleh kampus *King Abdullah University of Science and Technology* pada tahun 2009, atau partisipasi kaum perempuan Saudi pada ajang *Olympic Games* pertamakali pada tahun 2012 dan beberapa contoh lainnya semisal terjun pada sektor bagian administrator hukum negara pada tahun 2013³ merupakan salah satu kebijakan penting pemerintah Arab Saudi memberdayakan peran perempuan menuju upaya modernitas negara.

Masalahnya, jika kita dapat menelisik lebih dalam kasus tersebut, Bagaimana upaya pemerintah Arab Saudi dapat merealisasikan konsep modernitas sebuah negara yang telah memiliki label sebagai negara ultra-konservatif? Terutama terkait perubahan sosial negara yang serta merta tidak akan begitu saja menerima konsep modernisasi tersebut secara cepat dan apa saja tantangan dan pergolakan yang akan dilakukan kaum ulama (Kaum agamawan) menghadapi keputusan pemerintah tersebut terutama tentang kebijakan yang baru ini diumumkan yakni keputusan atas pencabutan larangan bagi perempuan mengendarai kendaraan pribadi di ranah publik. Apakah isu gender dan hak asasi perempuan hanya sebagai pancingan atau

² Madawi Al-Rasheed, *The Meaning of Right For Women, The World Today*, Vol. 68 No.2 (February and March, 2012), hal. 14.

³ Report of The Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights on his mission to Saudi Arabia, 6-23 June 2017, Thirty Fifth Session Human Right Council, Agenda Item 3, *Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including The Right to development*, hal. 14.

batu loncatan menuju modernisasi atau menjadi sebuah langkah besar tonggak sejarah pemerintahan Arab Saudi menuju proses modernitas? Tulisan ini ditujukan untuk menganalisa konteks upaya kebijakan pemerintah Arab Saudi menuju transisi modernisasi melalui visi 2030 dan peran perempuan Arab Saudi dalam pengembangan ekonomi dan kredibilitas negara.

MODERNISASI ARAB SAUDI DAN VISI 2030

Legitimasi kekuasaan monarki Arab Saudi sepanjang periode ini masih tetap bertahan. Kekuasaan rezim Al-Saud yang sudah berkuasa sejak tahun 1932 hingga sekarang masih menjadi sebuah anomali bagi negara-negara tetangga sekitarnya yang juga mempunyai kekuasaan absolut di Timur Tengah. Karena kemonarkiannya ini, banyak beberapa pihak memberi tantangan bergejolak seperti terjadinya peristiwa *Arab Spring* dan pembentukan CLDR (*Committee for the Defense of Legitimate Right*) dan ARC (*Advice and Reformation Committe*) yang dipimpin Osama bin Laden⁴. Namun seiring perubahan zaman, terdapat hal menarik di pemerintahan Arab Saudi yaitu perubahan arah kekuasaan negara lebih moderat dari kekuasaan-kekuasaan sebelumnya. Hal ini merupakan sebuah langkah baru dan momentum penting yang dicetuskan oleh Pangeran Mohammed bin Salman al-Saud dalam visi 2030 guna melepaskan ketergantungan kekuasaan pemerintah yang selama ini bersandar pada sektor minyak serta menjadi sebuah tantangan reformasi ekonomi yang mengesankan. Visi 2030 Arab Saudi merupakan kerangka besar upaya kerajaan Arab Saudi menuju sebuah kawasan modern, setidaknya ada 3 pilar penting di dalamnya, meliputi *A Vibrant Society*, *Thriving Economy* dan *An Ambition Nation*⁵. Sebuah kerangka baru sebagai upaya transformasi negara dan tentunya akan mengurangi jatah kenyamanan negara yang selama ini diterima masyarakat Arab Saudi sendiri semisal pada beberapa fasilitas negara yang terpangkas akibat turunnya harga minyak dunia yang saat ini mengalami keanjlokkan dari 120 dollar US per barel menjadi 30 dollar US per barel. Setidaknya sampai saat ini Saudi

⁴ Anoar Boukhars, *Crisis of Legitimacy in Saudi Arabia*, (Nevada: Presented at International Studies Association, 10-11 Oktober 2005), hal.5.

⁵ *A Vibrant Society* atau memberdayakan sumber daya manusia disamping sumber daya alam, *Thriving Economy* yang lebih terfokus pada pengembangan perekonomian jangka panjang dan berkelanjutan serta *Ambisi negara nasional* sebagai kesadaran negara untuk lebih efektif mengontrol pada pengembangan perekonomian negara. B A Albassam, *Political Reform in Saudi Arabia: Necessity or Luxury?*, Middle East Studies Online Journal, Vol. 3, No. 6, 2011.

telah menghabiskan dana hampir 10 persen dari subsidi anggaran pembelanjaan negara⁶.

Wacana modernisasi memang tidak mudah dipaparkan begitu saja, saat kita menginginkan dunia Islam atau Arab menjadi objek kajian. Definisi itu akan begitu saja berubah sesuai fakta yang berkembang dimana terdapat proses yang sejajar yang saling berhubungan. Menurut Johannes Berger mengatakan modernisasi adalah sebuah prestasi mendalam pada suatu masyarakat; sebuah proses khusus upaya memodernisasikan lainnya dalam bentuk kombinasi; sebuah negara yang tidak merintangi pengikut; sebuah proses modernisasi yang berpusat pada tujuan yang sama⁷. Atau dalam kata lain sebuah model populer yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi (pembangunan negara, partisipasi, redistribusi), mobilisasi dan transformasi internasional⁸.

Jeffrey Alexander, Edward Tiryakian dan lainnya yang mempunyai paham 'neo-modernism' atau 'modernism II' menyandarkan modernisasi pada sebuah demokrasi dan perkembangan ekonomi bebas dengan mengenyampingkan konsep benturan dengan aturan budaya Barat serta tanpa memperkirakan paham kebangsaan atau pergerakan fundamental. Tiryakian menyimpulkan analisis neo-modernisasi seperti ini:

1. Modernisasi adalah hasil dari sebuah tindakan individu atau kelompok, bukan berasal dari sistem perkembangan otomatis
2. Mereka menemukan jalan baru menuju sebuah tujuan dan mengisinya dengan nilai tapi tidak bermaksud menjadi tujuan akhir, bergantung pada sumber
3. Modernisasi bukan sebuah proses dari hawa nafsu, tapi sebuah kompetisi antara kaum modern, konservatif dan orang di sekelilingnya
4. Kriteria umum modernisasi dikatakan sukses adalah kesejahteraan pada perkembangan populasi
5. Pengetahuan adalah kekuatan berpacu, tapi agama dan tradisi tidak boleh terlalu meremehkan
6. Pusat modernisasi selalu berubah dan berpindah
7. Modernisasi bukan bersifat lurus dan berkelanjutan namun membentuk sebuah gerakan dan krisis pemungutan⁹.

⁶ Carlo Sdravovich and others, *Subsidy Reform in The Middle East and North Africa: Recent Progress and Challenges Ahead* (Washington DC: IMF, 2014), hal 18.

⁷ Johannes Berger, "Was bedeutet die Modernisierungstheorie wirklich—und was wird ihr blob unterstellt?", (Leviathan, 1996), hal. 46.

⁸ Wolfgang Zapf, *Modernization Theory - and the non-western world*, (Econstor: WZB Discussion Paper, No. P 2004-003), hal. 2.

⁹ Edward A Tiryakian, *Neo-Modernisierung: Lehren für die und aus der postsozialistischen Transformation*, hal. 31-52, juga dalam : Klaus Muller (ed)/ Max Weber, *Schriften 1894-1922*, Stuttgart"Kroner.

Lantas bagaimana konsep yang ditawarkan pemerintah Arab Saudi dalam upaya memodernisasikan negaranya agar lebih moderat? Penulis mencoba menggambarkan konsep yang dibawa Lerner tentang modernisasi sebagai faktor pendorong perubahan sosial di Timur Tengah. Dalam hasil penelitiannya, menemukan bahwa perubahan terjadi pada nilai-nilai tradisional masyarakat Timur Tengah ke karakter kehidupan yang lebih modern. Terdapat tiga variabel modernisasi yang digunakan. Pertama, lebih modern, dalam arti lebih banyak mengubah sikap tradisional masyarakat. Kedua, lebih dinamis, yakni berjalan dengan kecepatan yang meningkat dari waktu ke waktu. Ketiga, lebih stabil, dalam arti semunya pembagian kelas yang terjadi¹⁰. Dari ketiga variabel tersebut, sepertinya Arab Saudi mengalami beberapa perubahan meski sedikit lambat dari negara-negara sekitarnya.

Teori modernisasi Lerner membuktikan bahwa dalam posisi bagaimanapun semua negara akan mengalami modernisasi dan tidak mungkin sebuah negara mengarahkan tujuannya lebih tradisional dan terbelakang. Dan untuk menjadi negara yang modern, warga negara hanya perlu berusaha bersaing dalam tindakan dan gagasan yang dibawa warga Barat yang lebih dahulu meninggalkan keterbelakangan tradisi menuju dunia yang lebih modern. Modernisasi juga mengisyaratkan bahwa karena sebuah budaya 'tradisional' tidak mampu menciptakan sebuah level tinggi dalam mengembangkan teknologi. Mereka tampak hampa, tidak produktif, tidak kreatif dan hampir terhapus.

Upaya pemerintah Arab Saudi yang terkandung dalam visi 2030 mengungkapkan bahwa untuk merubah negara lebih moderat, Arab Saudi melakukan beberapa kinerja seperti kebijakan menaikkan harga bahan bakar subsidi negara hingga mencapai 40 persen pada seluruh keluarga kerajaan sejak tanggal 11 Januari 2016 lalu dan perencanaan melakukan penjualan saham ARAMCO kurang dari 5 persen senilai 2 triliun dollar US¹¹. Selain itu, beberapa fasilitas negara yang selama ini dinikmati masyarakat Arab Saudi harus terpankas akibat jatuhnya harga minyak dunia sekitar 120 dollar US per barel menjadi 30 dollar US per barel.

Anggaran pembelanjaan negara juga mengalami pengurangan hampir 10 persen yang sebelumnya Saudi mengalami defisit sebanyak 87 milyar dollar US, mulanya cadangan devisa 746 milyar dollar US tahun 2014 merosot menjadi 616 milyar dollar US. Selain dari gejolak turunnya harga minyak dunia yang semakin tahun semakin menipis, pengaruh konstelasi perpolitikan Arab Saudi (hegemoni terhadap krisis Yaman), serta demografi

¹⁰ Daniel Lerner, *Memudarnya Masyarakat Tradisional* (Terjemahan), (Yogyakarta:Gajah MadaUniversity Press, 1983), hal. 13.

¹¹ Muhammad Zulifa, *Visi Saudi 2030, Transformasi Menuju Era Kerajaan Modern*, *Journal* 2 Mei 2016. Selasar.com.

penduduk Arab Saudi yang setengahnya berusia produktif menjadi penyebab problematika Arab Saudi tak kunjung selesai.

Beberapa diversifikasi ekonomi yang ingin dicapai pemerintah Arab Saudi antara lain: pengembangan infrastruktur dan sektor non- minyak, mendirikan kota industri baru di daerah Jubail dan Yanbu (pusat fasilitas produksi petrokimia), mengubah lebih lanjut produksi minyak dari mentah menjadi minyak sulungan, dan mengutamakan sumber daya manusia warga Saudi terutama perempuan¹². Visi 2030 merupakan kumpulan ambisi dan target khusus untuk diversifikasi dan meningkatkan daya kompetisi. Terdapat keunikan tersendiri pada kebijakan baru yang dibuat pemerintah Arab Saudi. Pertama, visi 2030 dan semua kebijakan yang berhubungan, diindikasikan pada sebuah kesediaan untuk merubah larangan pada kebijakan tradisional. Kedua, untuk memenangkan gagasan tersebut, Mohammad bin Salman telah mengisyaratkan investasi politik skala besar yang belum pernah terjadi pada reformasi generasi keluarga kerajaan sebelumnya. Ia mengadopsi sebuah sifat baru, mengkritik negara yang telah kecanduan minyak dan mengatakan kerajaan akan hidup tanpa minyak pada tahun 2020. Hal ini kontras dengan kebijakan raja-raja sebelumnya yang lebih fokus mementingkan sumber minyak daripada sumber daya alam lainnya. Ketiga, pangeran Mohammad bin Salman telah mengambil langkah yang terkonsentrasi pada pembuatan kebijakan ekonomi dalam satu genggam, meyakinkan perputaran pada menteri ekonomi dan menutup hukum. Dari klarifikasi kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sesuatu pasti mempunyai alasan mengapa visi 2030 menurut para pengamat semata-mata hanya sebuah proyek pengembangan negara bukan melihat bagian dari permainan kekuatan pangeran kerajaan¹³. Namun, banyak analisa terhadap visi 2030 menganggap proyek tersebut hanyalah proyek yang meragukan. Karena memang untuk mensukseskan visi tersebut, banyak tantangan akan terjadi.

BEBERAPA TANTANGAN PERUBAHAN SOSIAL

Arab Saudi memiliki kekuatan erat kaitannya dengan ideologi konservatifnya, terutama dalam urusan hak asasi perempuan. Ini terlihat dari beberapa contoh kasus yang menekankan posisi perempuan masih berada dalam otoritas kaum laki-laki. Namun, sejak adanya perubahan sosial yang terjadi dalam negara tersebut terutama saat pangeran Muhammad bin Salman mencanangkan programnya 'visi 2030', banyak perubahan terjadi sehingga menimbulkan banyak tantangan antara lain:

¹² Jane Kinninmont, *Vision 2030 and Saudi Arabia's Social Contract: Austerity and Transformation*, (Research Paper, July 2017), Hal 3- 4.

¹³ Jane Kinninmont, *Vision 2030 and Saudi Arabia's hal. 10.*

Adanya tantangan dari pihak kerajaan sendiri yang berusaha mendatangkan hubungan yang berkaitan dengan perombakan dalam keluarga kerajaan. Raja telah menyusun perubahan garis suksesi dengan menawarkan jaminan anaknya akan menjadi penerus baginya. Padahal sejak masa Abdulaziz bin Abdulrahman, pendiri kerajaan modern yang meninggal pada tahun 1953, sejumlah anaknya pasti akan menempati warisan tahta darinya. Namun sejak raja Salman menjabat tahta tersebut, raja Salman menampakkan kemornakiannya yang terlihat dari pengangkatan anaknya sebagai pangeran kerajaan, yang seharusnya terdapat hak prioritas lebih bagi keponakannya yang juga menjadi pangeran kerajaan meski hanya berlangsung dua tahun¹⁴.

Meski terlihat luwes, tidak dapat diragukan lagi jika suatu saat akan terjadi tensi membludak di dalam keluarga kerajaan. Banyak klan Saudi menyimpulkan terhadap keputusan yang telah dibuat raja Salman yang menunjuk putranya Muhammad bin Salman menjadi putra mahkota itu adalah sebuah keputusan yang gegabah. Apalagi di usianya yang baru menginjak angka 30 dengan pengalaman yang sedikit telah diberi mandat memegang kekuatan di dalam sektor kekuatan dan keamanan. Terlebih lagi, Muhammad bin Salman baru saja menjabat sebagai kepala menteri dewan bidang strategi ekonomi dan pertahanan. Tentunya, keraguan ini tidak akan secara langsung dinyatakan secara publik oleh keluarga kerajaan namun jika klan Saudi melihat sederet gangguan atas perombakan ini, tentu saja mereka ikut campur tangan.

Kedua, Peran ulama dan sistem kesukuan yang kental juga mempunyai kekuatan besar dalam mempertahankan kerajaan karena norma sosial konservatif yang telah membekas selama beberapa dekade di kawasan ini. Semisal jika sebuah norma sosial berubah, mau tidak mau kekuatan elite pasti harus diubah. dan mereka melihat kesediaan kerajaan mengadopsi beberapa pembaharuan liberal sebagai sebuah pelanggaran atas pakta antara ulama Wahabi dan keluarga kerajaan Saudi. Terdapat bahaya besar akan terjadi terhadap beberapa kaum agamawan dan tetua adat elit di Saudi Arab jika mereka sungguh-sungguh akan memilih perlawanan dengan cara bergabung dengan kaum jihadis – yang mempunyai reputasi budaya radikal-yakni bergabung dengan Al-Qaeda. Namun, jika mayoritas kaum konservatif tidak mendukung para jihadis, ideologi yang selama ini melengkapi kekuatan politik akan hilang dan mengalami kerugian serta hal tersebut berdampak pada kaum militant islam untuk memanfaatkan kekosongan yang ada. Hal ini akan menimbulkan kegelisahan sosial dan kemungkinan terjadi kekerasan hebat.

Selain itu, sistem hukum di Arab Saudi yang bersandar pada hukum syariah atau hukum Islam tidak terkodifikasi dengan baik, dimana kekuatan ulama sangat mempengaruhi dan membuat keputusan penting membentuk

¹⁴ Kamran Bokhari, *In Saudi Arabia, Expanding Rights and Growing Risks, Reality Check*, geopoliticalfutures.com 3 Oktober 2017, diakses 19 Februari 2018. Hal. 3.

dan mencetak dari norma sosial, adat dan kebiasaan dapat mengganggu dampak hukum pada perempuan dan status ekonomi¹⁵.

Konsep kontrak sosial Arab Saudi terdiri dari kelompok gabungan, yang secara implisit terdiri atas berbagai macam institusi mulai dari keluarga kerajaan Arab Saudi, ulama, kaum bisnis, ketua suku dan kelompok sosial lainnya yang membuat suatu keputusan tekad untuk membentuk negara. Kelompok- kelompok inilah yang menjadi pemegang atau subjek utama dalam perubahan. Ulama sendiri memegang peran penting dalam negara yang terkonsentrasi pada sistem pendidikan dan hukum khususnya tentang isu keluarga. Keamanan, urusan luar negeri dan beberapa aspek ekonomi di bawah pengawasan keluarga Al-Saud

Beberapa poin yang diperhatikan kaum politik elit adalah dengan tetap mempertahankan kehendak kaum agamawan dan tetua adat untuk menjaga stabilitas kekuasaannya sedangkan Riyadh harus lebih berhati-hati agar tidak terlampaui jauh mereformasikan negaranya menjadi lebih liberal karena dengan memberdayakan bahaya yang berlarut-larut dikhawatirkan adanya pemaksaan besar terhadap perubahan islam sebagai ideologi negara. Pemerintah Arab Saudi akan mengupayakan keseimbangan sistem liberal dan budaya konservatif negara agar tercipta stabilitas kerajaan yang sudah dinikmati selama 85 tahun.

PERAN PEREMPUAN DAN ISU GENDER

Kerap kali sebagian besar orang salah kaprah dalam memaknai istilah gender, perbincangan mengenai gender sering kali diasosiasikan dengan makna 'perempuan'. Kata gender sendiri didefinisikan sebagai '*The apparent disparity between men and women in values and behaviour*' atau menurut Janet A Kourany, menyebutkan gender sebagai '*a basis for defining the different contributions that man and woman make to culture and collective life by dint on which they are as man and woman*'¹⁶. Karena adanya konsep perbedaan gender itulah yang melahirkan ketidakadilan gender.

Persoalan ketidakadilan gender ini biasanya berkisar pada tiga maksud: pertama, saat laki-laki biasanya lebih banyak mempunyai kesempatan, lebih memiliki kebebasan, kehormatan sosial yang tinggi daripada perempuan di berbagai persamaan karakteristik semisal asal-usul kelas, ras, kebangsaan dan umur. Kedua, laki-laki biasanya memegang hak kuasa atas perkawinan dan lainnya yang berkaitan dengan gender. Dan ketiga, laki-laki menduduki posisi sosial lebih banyak dalam hal politik,

¹⁵ Eman Alhussein, *Triangle of Change: The Situation of Women in Saudi Arabia*, (NOREF Expert Analysis, July 2014).

¹⁶ Dikutip dari Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an, Cet II*, (Jakarta:Paramadina, 2001), hal. 4.

ekonomi, hukum dan kekuatan budaya¹⁷. Mengenai persoalan akitifitas perempuan di Arab Saudi, para aktifis Barat berpendapat bahwa tindakan mereka sudah menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai hak untuk membuat keputusan, mereka berpikir bahwa untuk mengembalikan persamaan, baik di rumah, di tempat kerja, dan pada posisi pendidikan, menyisakan bekas tantangan terpenting dalam merubah wajah pemerintah Arab Saudi pada abad 21¹⁸.

Konsep ketidakadilan gender sendiri muncul antara tahun 1980 dan pertengahan tahun 90-an. Saat itu terdapat sebuah konferensi mendiskusikan persamaan gender bagi negara berkembang di segala bidang terutama dalam cakupan kesehatan. Karena ketidakadilan gender berkenaan dengan ketidakseimbangan nilai peran perempuan dan laki-laki, maka persamaan gender dapat didefinisikan sebagai sebuah cara perlakuan perempuan dan laki-laki dalam bidang hukum dan kebijakan, dan persamaan dalam jalan sumber hasil dan tugas dalam rumah tangga, komunitas dan masyarakat umumnya¹⁹.

Islam sendiri telah menunjukkan konsep persaudaraan dan persamaan terhadap semua manusia tanpa membedakan jenis. Al-Qur'an menegaskan bahwa semua manusia merupakan anak cucu dari seorang laki-laki yang bernama Adam dan Seorang perempuan yang bernama Hawa yang menjadikan persamaan dalam garis keturunan. Islam memandang peran perempuan merupakan pemegang utama dalam berbagai aspek masyarakat, termasuk kekuatan dalam bekerja. Menurut tradisi Nabi Muhammad Saw, tidak ada kuasa untuk melarang perempuan mencari pekerjaan, dan sesuai dengan perkataan Younos²⁰, jika sebuah pemerintahan islam melarang perempuan untuk bekerja maka pemerintah tersebut telah melanggar hukum Islam.

Mansour Fakih, mengidentifikasi ketimpangan gender dalam lima bentuk, pertama, kekerasan terhadap perempuan, perempuan cenderung dianggap lebih lemah dari segi fisik dan hal ini perempuan kerap kali berpotensi sebagai korban kekerasan. Kekerasan ini bisa berwujud pada kekerasan fisik, seksual ataupun psikologis. Kedua, adanya marginalisasi atau pemetaan sikap terhadap perempuan. Kita seringkali melihat hal tersebut terjadi dalam ranah domestik maupun publik yang telah meringgirkan hak kaum perempuan. Ketiga, terdapat subordinasi perempuan yang menganggap posisi perempuan menempati urutan kedua dalam struktur masyarakat. Keempat, adanya stereotip negatif terhadap keberadaan

¹⁷ R M Jackson, *Destined for Equality: Inevitable Rise of Women's Status*, (Harvard University Press, 1998).

¹⁸ R Inlehart and P Norris, *Rising tide: Gender and Cultural Change around the World*, (Cambridge University Press, 2004).

¹⁹ WHO Promoting *Gender Equality: Method, Measurement and Implications*, (Ashgate Publishing Limited, 2010).

²⁰ F Younos, *Gender Equality in Islam*, (Library of Congress, 2011).

perempuan, citra perempuan yang cenderung sensitif, irasional, lemah dan tidak independen menyebabkan perempuan mengalami banyak diskriminasi sehingga menjadikan beban ganda untuk hidup bagi kebanyakan perempuan. Kelima, ketidakadilan gender tersebut pada prakteknya saling mempengaruhi, misalnya, antara marginalisasi dan subordinasi. Lantaran perempuan telah dilabel negatif karena sifat lemah dalam segi finansial atau ekonomi, laki-laki merasa mempunyai hak melakukan kekerasan fisik atau seksual terhadap kaum perempuan²¹.

Isu ketidaksamaan gender di Arab Saudi sering didiskusikan beberapa tahun akhir ini tanpa melihat pertimbangan keunikan dari sejarah budaya masyarakat Arab Saudi. Ketidakseimbangan kekuatan antara laki-laki dan perempuan di Arab Saudi merupakan sebuah akibat adanya campurtangan pemerintah dan unsur budaya, bukan berasal dari pernyataan hukum negara. Keterbatasan akses perempuan untuk mencari sistem keadilan, semuanya dipercayakan kepada laki-laki yang memiliki hubungan untuk mewakili mereka. Ketidakseimbangan tersebut juga berdampak pada pendidikan mereka yang merasa kesulitan untuk memberikan hak suara yang seharusnya ada dalam sistem pendidikan. Kegiatan ini berdampak pada apa yang mereka inginkan atau kerjakan menjadi sangat terbatas.

Beberapa laporan penting tentang kejadian politik dan sosial yang telah berkontribusi kepada posisi perempuan Saudi dalam masyarakat. Lima tahun lalu kawasan Timur Tengah memikul beban tantangan yang berpengaruh kepada seluruh wilayah timur tengah terutama di daerah teluk. Salah satunya Arab Saudi yang masuk dalam kawasan teluk secara langsung atau tidak telah mengalami pergolakan besar. Pertama dan yang utama, adalah saat ditemukannya tambang minyak pada tahun 1930-an sebagai kejadian utama kawasan itu. Akibat penemuan ini terjadi perubahan skala besar, termasuk pembukaan pendidikan laki-laki dan perempuan. Sebuah pergolakan ekonomi yang meningkatkan pendapatan dari minyak dalam menggapai ke arah pendidikan, dan mengubah gaya hidup dan dua perubahan ini merubah semua struktur masyarakat²². Kedua, saat terjadi revolusi Iran Januari 1979 yang menggulingkan tahta kemonarkian Shah dan mendirikan pemerintahan Islam yang baru di Iran yang dikuatkan para pemuka agama Arab Saudi. Sehingga para analisis menduga²³ adanya perubahan terhadap masyarakat Saudi, karena memang selama ini masyarakat Saudi mempunyai pengalaman kecil dalam membuat kebijakan ke arah hak perempuan.

²¹ Mansour Fakih, 2008, *Analisis Gender dan.....*, hal. 10.

²² M Yamani, *Some Observations on Women in Saudi Arabia*. In M Yamani (ed), *Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives*, (New York: New York University Press), hal. 263-282.

²³ Amani Hamdan, *Women and Education in Saudi Arabia: Challenges and Achievements*, *International Education Journal*, 2005, 6 (1), hal. 43.

Kehadiran Amerika di Arab Saudi dalam memulai produksi minyak pada tahun 1979 dan membentuk sebuah perusahaan ARAMCO (*Arabian American Oil Company*) di Dhahran, saat itu kebanyakan perempuan Amerika lebih menghabiskan waktu dengan jual-beli, tanpa hijab, ke mall dan mengendarai mobil, sesuatu yang dilarang bagi perempuan Arab Saudi untuk melakukan dan akhirnya mereka mulai bertanya beberapa hak persamaan antara dua budaya itu, keseimbangan ini sangat sulit untuk dipahami, terutama mengenai ranah perempuan.

Peran hukum syariah yang didalamnya juga terkandung unsur budaya kesukuan, telah menegaskan peran gender di kawasan Arab Saudi. Dalam aspek budaya, termasuk di dalamnya praktek budaya kesukuan telah menolong pengotakan posisi perempuan dalam masyarakat dan menunjukkan adanya pemisahan gender bagi perempuan dalam bermacam-macam aspek di masyarakat.

Shukri berpendapat bahwa posisi perempuan di Timur Tengah tidak bisa ikut berkontribusi karena mereka menganggap perubahan tersebut adalah bagian hakiki atas agama. Karena pada kenyataannya, banyak gambaran menunjukkan mereka terlalu penurut. Mereka juga menunjukkan bahwa di kawasan Timur Tengah, peran perempuan dan status adalah suatu struktur yang sudah ditentukan oleh ideologi negara, tingkatan dan macam-macam tingkatan ekonomi, tingkatan industri dan urbanisasi, posisi di dalam sistem dunia dan keberadaan kelas. Termasuk sistem gender juga menjadi subjek perubahan²⁴. Bagaimanapun situasi perempuan di Timur Tengah mempunyai posisi yang belum dapat terlihat suatu tingkatan jerih payahnya di dalam ketenagakerjaan.

ISU PEREMPUAN SEBAGAI TONGGAK SEJARAH MENUJU PERUBAHAN

Arab Saudi merupakan sebuah negara konservatif antara perpaduan sosial dan agama, hal ini terlihat pada budaya homogen masyarakat yang terdiri atas kesukuan dan hubungan agama yang erat dan menjadikan kawasan ini unik dengan beragam budayanya yang kompleks, sehingga untuk membedakan antara prinsip Islam dengan adat Arab itu sendiri sangat sulit. Beberapa kepercayaan adat Arab Saudi yang melarang perempuan Saudi mengendarai kendaraan atau menjadi bagian praktisi hukum dan insinyur tersebut bukanlah berasal dari hukum Islam melainkan didatangkan oleh stigma masyarakat dalam melestarikan budaya²⁵.

²⁴ Review by Shahrzad Mojab, Shirin J A Shukri, *Social Changes and Women in The Middle East: State Policy, Education, Economics, and Development*, (The University of Chicago Press Journals: Comparative Education Review, Vol 44, No 3 (Agustus, 2000), hal 367.

²⁵ A Hamdan, 2005, *Women and Education in Saudi Arabia: Challenges and Achievement*, (International and Education Journal, 6 (1), hal. 42-64.

Kerajaan Monarki Saudi memperkenalkan beberapa reformasi yang mengejutkan. Pada tanggal 26 September 2017, raja Salman menandatangani sebuah keputusan bahwa sejak dimulai bulan Juni 2018 mendatang, pemerintah memberikan hak bagi perempuan untuk berkendara. Pada hari yang sama, Riyadh menunjuk seorang perempuan untuk berbicara di kedutaan besar di Washington, beberapa deret hari kemudian, 107 dari 150 peserta bidang penasehat, dewan Syura, memberikan ruang bagi perempuan dalam bidang mufti serta untuk pertamakalinya perempuan diizinkan turut berpartisipasi pada acara perayaan nasional yang diagendakan di sebuah stadium di Riyadh²⁶.

Salah satu hal yang mempengaruhi masyarakat selain dari bidang ekonomi, politik dan budaya adalah adanya migrasi tenaga kerja internasional yang menimbulkan dampak adanya perbedaan gender secara mencolok. Bagaimana kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara mengutamakan pasokan minyak sebagai ladang ketenagakerjaan dan perkembangan ekonomi. buruh tenaga kerja yang memungkinkan pengendalian ekonomi negara fiksi dengan menerima gaji murah ,dan mengirimkannya ke negara yang memiliki tujuan memperdayakan kaum pengangguran.

Kunci utama perubahan sosial biasanya terdapat dalam struktur ekonomi termasuk di dalamnya perbedaan kelas dan hubungan kekayaan. Selama ini kawasan Timur Tengah, terutama Arab Saudi mengutamakan struktur ekonomi pada hasil pendapatan penjualan minyak atau beberapa kasus datang dari dana investasi orang asing dan pemasukan negara²⁷. Perkembangan ekonomi telah mengubah status perempuan dalam alur yang berbeda dalam ranah negara maupun kelas. Bagaimana negara mampu mengatur perkembangan ekonomi hampir di segala bidang, dan sebagai pusat ekonomi dan kebijakan politik, negara mengotakkan akses memberdayakan perempuan dan status ekonomi.

Adanya revolusi dalam skala besar atau terbatas pada revolusi politik, juga menjadi salah satu faktor perubahan sosial yang dominan. Terutama di kawasan Arab Saudi, perubahan datang begitu lambat akibat adanya peran elit. Konflik politik juga dapat membawa kepada perubahan social, termasuk perubahan dalam segi ekonomi dan politik atas status perempuan, sebuah kesadaran gender yang memuncak dan beberapa aktifitas politik pada perempuan. Dan satu lagi dimensi paling penting dalam perubahan sosial adalah kesadaran terhadap sistem patriarki dan sistem persaudaraan tradisional, perubahan demografi yang di dalamnya termasuk tentang aturan perkawinan dan tingkah laku kesuburan juga merupakan salah satu dampak pada perkembangan ekonomi, perbaikan hukum negara, dan hasil pendidikan perempuan. Seringkali tipe perubahan ini memaksa, tipe

²⁶ Kamran Bokhari, In Saudi Arabia,.... hal. 2.

²⁷ Valentine M Moghadam, *Modernizing Women: Gender and Social Change in The Middle East, Second Edition*, (US: Lynne Rienner Publishers, 2003), hal. 22.

bagaimana struktur keluarga yang melibatkan status perempuan di dalam keluarga dan dalam masyarakat tidak ditemukan.

Raja Salman dan putra mahkota membutuhkan sebuah jalan untuk menopang dukungan mereka, dan dengan memberi hak kebebasan bagi perempuan, terutama tentang soal mengemudi kendaraan akan menjadi suatu kehormatan bagi perempuan yang selama ini berusaha mencoba masuk demi hak mereka, dan dengan presentase perempuan hampir setengah dari populasi negara, perubahan ini dijamin akan memenangkan beberapa poin dalam keluarga kerajaan dan remaja Saudi utamanya akan memperdebatkan perubahan tersebut dalam media sosial.

Beberapa pemerhati peristiwa ini pasti melihat sebagai perubahan yang bijak, namun menurut Kamran Bokhari²⁸, ini merupakan salah satu bagian dari ultra-konservatif Arab Saudi yang dikenal dengan sebutan Salafisme yang terlalu banyak perubahan dan terlalu cepat. Sehingga banyak ulama dan tetua adat tidak menerima perubahan ini dan dikhawatirkan akan terpeleket ke dalam budaya liberal.

Yang perlu digarisbawahi dalam perubahan ini adalah adanya keberatan mengenai 'adanya potensi penolakan sebagai akibat dari perubahan' itu. Hal ini menjadikan jawaban mengapa pemerintah tidak memberikan sebuah aksi untuk mengimplementasikan perubahan meski dewan senior para sarjana telah menyetujui hal tersebut. Setidaknya, pemerintah di sini ingin memberikan pertanyaan besar bagi para ulama untuk memecahkan pertanyaan 'bagaimana suatu hukum baru dapat diimplementasikan'.

Konteks peran perempuan ikut andil dalam membangun modernisasi pemerintah Arab Saudi ini terlihat jelas. Perubahan cepat terjadi ketika kita melihat adanya perkembangan peran pemimpin perempuan yang terjadi progresitas dalam sektor privat dan publik. Padahal jauh 10 tahun sebelumnya, perempuan Arab Saudi memperjuangkan hak dan mendorong adanya implementasi reformasi. Mereka diperbolehkan mengikuti pemilu, kelas kedua dalam sistem parlemen bagi perempuan Saudi untuk menduduki 20 persen kuota kursi parlemen (Dewan Syura) selama tiga tahun. Pendidikan tersier perempuan juga dalam ranking tertinggi dan pemberdayaan perempuan mencapai angka 34 persen walaupun ekonomi pemerintahan sulit akibat turunnya harga minyak pada tahun 2016. Ini merupakan poin penting untuk menunjukkan aksi perempuan dapat memimpin negara dan hal ini merupakan kunci utama terealisasinya visi 2030 dan program transformasi nasional.

²⁸ Kamran Bokhari, *In Saudi Arabia, Expanding Rights ...*, hal. 3.

PENUTUP

Peran perempuan Arab Saudi dalam partisipasinya menuju negara lebih moderat patut mendapat apresiasi besar yang harus diakui. Meski secara nyata, banyak tantangan perubahan yang akan terjadi apabila terlalu dipaksakan. Potensi penolakan perubahan yang terjadi akan menjadi sebuah resiko besar yang harus ditanggung kerajaan mengingat perubahan yang dilakukan tersebut kontras dengan kebijakan raja-raja sebelumnya yang menjadikan paham ultra konservatif sebagai dasar pendirian negara. Namun, untuk membuktikan upaya modernisasi berlangsung di negara tersebut, salah satu daya tarik wacana modernisasi kawasan adalah dengan menarik isu perempuan dan gender sebagai salah satu langkah efektif mengemas isu-isu negatif yang selama ini menjadi stigma atas kawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Vision 2030, hal. 37.
- Albassam, B. A. 2011. Political Reform in Saudi Arabia: Necessity or Luxury?. Middle East Studies Online Journal, Vol. 3, No. 6.
- Alhusein, Eman. Juli 2004. Triangle of Change: The Situation of Women in Saudi Arabia. NOREF Expert Analysis.
- Al-Rasheed, Madawi. 2012. The Meaning of Right For Women, The World Today, Vol. 68 No.2 February and March.
- Berger, Johannes.1996. Was bedeutet die Modernisierungstheorie wirklich—und was wird ihr blob unterstellt?. Leviathan.
- Boukhars, Anoar. 2005. Crisis of Legitimacy in Saudi Arabia. Nevada: Presented at International Studies Asssocation, 10-11 Oktober.
- Bokhari, Kamran. 2017. In Saudi Arabia, Expanding Rights and Growing Risks, Reality Check, geopoloticalfutures.com 3 Oktober 2017, diakses 19 Februari 2018.
- Hamdan, A. 2005, Women and Education in Saudi Arabia: Challenges and Achievement, (International and Education Journal, 6 (1).
- Inlehart, R. and P Norris.2004. Rising tide: Gender and Cultural Change around the World. Cambridge University Press.
- Jackson, R .M. 1998. Destined for Equality: Inevitable Rise of Women’s Status. Harvard University Press.
- Kinnimont, Jane. Juli 2017. Vision 2030 and Saudi Arabia’s Social Contract: Austerity and Transformation. Research Paper.
- Lerner, Daniel. 1983. Memudarnya Masyarakat Tradisional (Terjemahan).Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Moghadam, Valentine M. 2003. *Modernizing Women: Gender and Social Change in The Middle East*, Second Edition. US: Lynne Rienner Publishers.
- Mojab, Shahrzad dan Shirin J A Shukri. 2000. *Social Changes and Women in The Middle East: State Policy, Education, Economics, and Development*, (The University of Chicago Press Journals: Comparative Education Review, Vol 44, No 3.
- Report of The Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights on his mission to Saudi Arabia, 6-23 June 2017. Thirty Fifth Session Human Right Council, Agenda Item 3. Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including The Right to development.
- Sdravovich, Carlo and others. 2014. *Subsidy Reform in The Middle East and North Africa: Recent Progress and Challenges Ahead*. Washington DC: IMF.
- Tiryakian, Edward A. tt. *Neo-Modernisierung: Lehren fiir die und aus der postsozialistischen Transformation*.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Cet II Jakarta: Paramadina.
- WHO Promoting. 2010. *Gender Equality: Method, Measurement and Implications*. Ashgate Publishing Limited.
- Yamani, M. tt . *Some Observations on Women in Saudi Arabia*. In M Yamani (ed). *Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives*. New York: New York University Press.
- Younos, F. 2011. *Gender Equality in Islam*. Library of Congress.
- Zapf, Wolfgang. 2004. *Modernization Theory - and the non-western world*. Econstor: WZB Discussion Paper, No. P 2004-003.
- Zulifa, Muhammad . *Visi Saudi 2030, Transformasi Menuju Era Kerajaan Modern*. Journal 2 Mei 2016. Selasar.com.